



KOTA BEKASI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025

KECAMATAN BEKASI BARAT



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Bekasi Barat tahun 2025 ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan Laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintahan Kecamatan Bekasi Barat dalam melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi di setiap aspek pemerintahan, sesuai dengan amanat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini memuat berbagai capaian kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Bekasi Barat selama periode 2025, berdasarkan indikator kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan ini juga menguraikan perencanaan strategis, pelaksanaan program dan kegiatan, hasil evaluasi kinerja serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) ini dimaksudkan untuk:

- A. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku;
- B. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsif;
- C. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;
- D. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan khususnya pada perencanaan pembangunan daerah yang berperan penting dalam konstelasi perencanaan pembangunan di Kota Bekasi. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik yang berdimensi lokal, regional, dan nasional. Untuk mendukung semua itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi, aspek sosialisasi, aspek pemerintahan umum dan aspek pembinaan aparatur perencanaan pembangunan.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025 ini dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi untuk peningkatan manajemen Kinerja yang lebih baik

Bekasi Barat, 10 Januari 2026

PI. CAMAT BEKASI BARAT



DEWI ASTIYANTI, S.T., M.Si.

Pembina

NIP. 19770831 200012 2 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
---------------------	---

Daftar Isi.....	iii
-----------------	-----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi.....	3
1.3. Aspek Strategis Organisasi.....	5
1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	7
1.5. Sistematika Penyajian.....	11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis.....	13
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	13
2.1.2. Indikator Kinerja Utama.....	15
2.2. Perjanjian Kinerja	17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama.....	26
3.3. Realisasi Anggaran.....	51

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	53
4.2. Rencana Tindak Lanjut	54



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Barat tahun 2025 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja



Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi adalah sebagai sarana bagi Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Kecamatan Bekasi Barat dan Kota Bekasi;
2. Menjadikan Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kecamatan Bekasi Barat dan Kota Bekasi terhadap penyelenggara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bekasi Barat dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja kecamatan Bekasi Barat pada Tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada Bab III (Akuntabilitas Kinerja) pada Laporan Kinerja Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025 ini.



1.2 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat. Kedudukan Kecamatan juga dijelaskan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi, serta Peraturan Wali Kota Bekasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi.

Kecamatan Bekasi Barat memiliki 5 (lima) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Bintara;
2. Kelurahan Bintarajaya;
3. Kelurahan Kranji;
4. Kelurahan Kotabaru;
5. Kelurahan Jakasampurna.

Kedudukan Kecamatan Bekasi Barat di pimpin oleh Camat, dimana Camat melaksanakan sebagai kewenangan Wali Kota Bekasi yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara Urusan Pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas pemerintahan pusat di wilayah kecamatan. Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, meliputi bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta administrasi umum.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi, Camat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
4. Pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;



5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
7. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kota yang ada di Kecamatan;
11. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota;
12. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
13. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Adapun Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Lurah dan pejabat structural. Berikut struktur organisasi Kecamatan Bekasi Barat sebagai berikut :

1. Camat, membawahkan:
2. Sekretaris Kecamatan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
7. Seksi Ketenteraman, Keamanan dan Ketertiban.
8. Lurah, membawahkan:
 - a. Sekretaris Kelurahan;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;



d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah metropolitan jabodetabek dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis Kota Bekasi terletak dibagian utara Jawa Barat antara 106°48'28" - 107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6" - 6°30'6" Lintang Selatan, kondisi topografi relative datar (kemiringan lahan bervariasi rata-rata 0-3%) dan merupakan daerah beriklim panas dengan suhu berkisar antara 28°C - 32°C, kelembaban antara 80 % - 90%, yang dipengaruhi oleh angin musim barat dan musim timur.

Kecamatan Bekasi Barat merupakan bagian dari Kota Bekasi yang terletak di wilayah barat Kota Bekasi yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor yang dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya.

Luas wilayah Kecamatan Bekasi Barat adalah 1.492,71 Ha, Kecamatan Bekasi Barat terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Bintara : luas 328 Ha;
2. Kelurahan Bintarajaya : luas 234 Ha;
3. Kelurahan Kranji : luas 249 Ha;
4. Kelurahan Kotabaru : luas 181 Ha;
5. Kelurahan Jakasampurna: luas 501 Ha.

Berdasarkan pembentukannya batas Kecamatan Bekasi Barat adalah:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Selatan dan Kecamatan Pondok Gede;
2. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta (Jakarta Timur);
3. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Medan Satria;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Selatan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

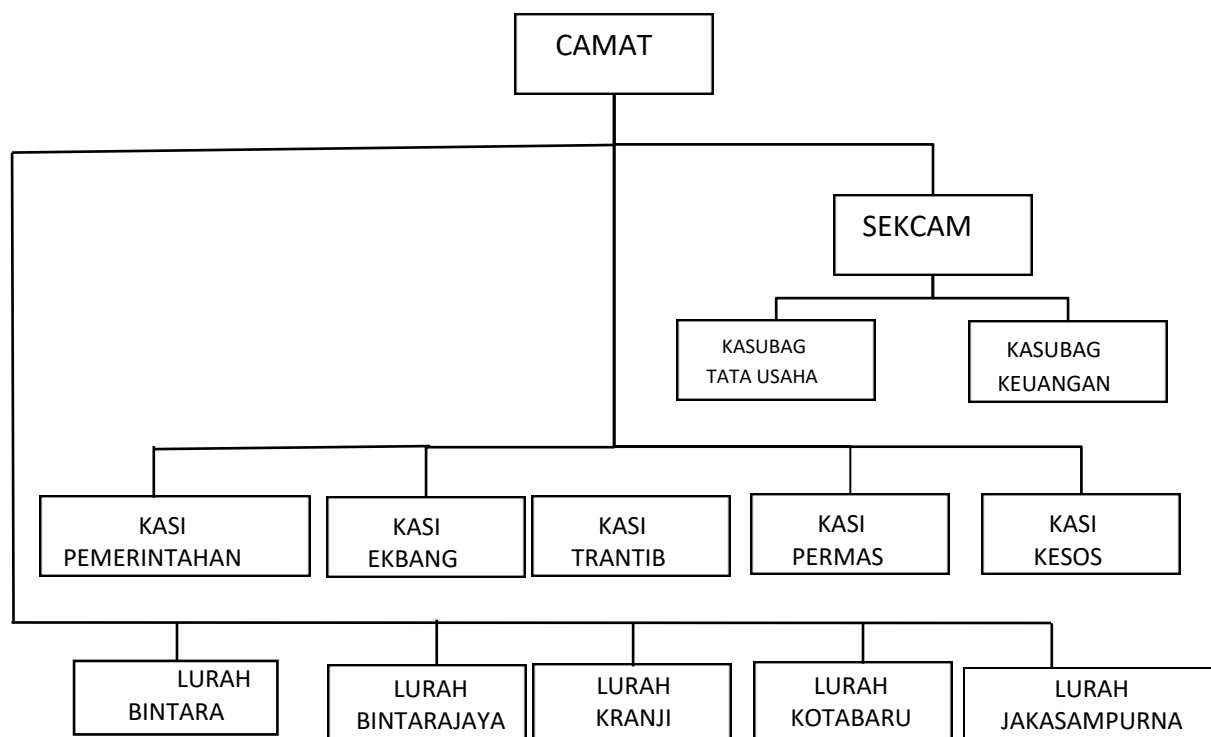
Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di dukung oleh 209 personil yang terdiri dari 55 Aparatur Sipil Negara (PNS), 130 PPPK dan 24 Tenaga Kontrak Kerja, dengan jumlah personil menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pendidikan Pegawai Kecamatan Bekasi Barat

SDM	JUMLAH	PENDIDIKAN						
		SD	SMP	SMA	D III	S1	S2	S3
Pejabat Struktural	34	-	-	-	1	12	21	-
Fungsional Umum / Pelaksana	21	-	1	8	1	10	1	-
PPPK	130	-	1	74	11	44	-	-
TKK	24	-	-	17	-	7	-	-
TOTAL	209	-	2	99	13	73	22	-

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025

Tabel 1.2
Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Barat



Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025



1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kecamatan Bekasi Barat pada tahun 2025 terdiri 5 Program, 13 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan diantaranya :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.



V. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pengadaan Mebel;
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

VI. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

VII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

I. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum;
2. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bintara;
3. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bintarajaya;
4. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bintarajaya;



5. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kranji;
6. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kotabaru;
7. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jakasampurna.

II. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

I. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bintara;
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bintarajaya;
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kranji;
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kotabaru;
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jakasampurna;
7. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Bekasi Barat);
8. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintara;
9. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintarajaya;
10. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kranji;
11. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotabaru;
12. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jakasampurna;
13. Evaluasi Kelurahan.

II. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;



2. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bintara;
3. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bintarajaya;
4. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kranji;
5. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kotabaru;
6. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jakasampurna.

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

I. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
3. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Bintara;
4. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Bintarajaya;
5. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kranji;
6. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kotabaru;
7. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Jakasampurna.

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

I. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Barat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis



Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; struktur organisasi; serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum;

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun keggalan pencapaian kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan langkah strategis awal dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada bab ini, diuraikan mengenai rencana kinerja Kecamatan Bekasi Barat untuk tahun 2025 yang mencakup tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Perencanaan tahun 2025 memiliki karakteristik khusus karena merupakan masa transisi fundamental dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Berdasarkan arah kebijakan Pembangunan daerah, terjadi peralihan dari Renstra Periode 2024-2026 menuju Renstra Periode 2025-2029. Peralihan ini dilakukan untuk menyelaraskan arah pembangunan kecamatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, guna memastikan kesinambungan pelayanan public dan Pembangunan wilayah.

2.1 Visi dan Misi RPJMD Kota Bekasi 2025-2029

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045.

Visi yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 merupakan Gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJPD. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan Upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi. Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”**.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi di atas, rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi, yaitu :

1. **Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai;**



2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun Rohani yang semakin kondusif dan berkelanjutan;
3. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya disukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi Pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat;
5. **Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf Internasional yang keren.**

Kecamatan Bekasi Barat berperan aktif dalam mewujudkan Misi ke-1, yaitu : *“Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai”*, dukungan ini difokuskan pada :

- Tujuan ke – 1 : Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan Lestari.
- Sasaran 1.1 : Meningkatnya estetika kota di wilayah Kecamatan Bekasi Barat yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur lokal yang modern.

Sejalan dengan Upaya penguatan manajemen pemerintahan, Kecamatan Bekasi Barat mendukung Misi ke – 5, yaitu : *“Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren”*. Dukungan ini difokuskan pada :

- Tujuan ke – 5 : Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata Kelola pemerintahan modern dan inovatif.
- Sasaran 5.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di Tingkat Kecamatan.

2.2 Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029

Dalam masa transisi ini, Kecamatan Bekasi Barat melakukan penyesuaian terhadap target-target kinerja. Jika pada Renstra 2024-2026 fokus utamanya yaitu peningkatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, peningkatan ketertiban umum, maka pada Renstra 2025-2029, fokus



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

dikembangkan pada peningkatan aktifitas Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam mendukung pemberian layanan publik dan peningkatan efektivitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan. Pengembangan fokus dilakukan dalam rangka mendukung upaya pemerintah Pusat dan Kota Bekasi dalam pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan penanganan stunting.

Perubahan tujuan dan sasaran tahun 2025 berdasarkan Renstra 2024-2026 ke Renstra 2025-2029 disajikan 2 (dua) pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Bekasi Barat		Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)	40	42	42
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bekasi Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	82,5	82,5	83
		Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bekasi Barat	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat	40	42	42
2	Mewujudkan Kecamatan Bekasi Barat yang Aman dan Nyaman		Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	22%	25%	30%
		Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Bekasi Barat	Persentase Zonasi yang Tertib di Kecamatan Bekasi Barat	22%	25%	30%

Sumber data : Renstra Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024-2026



Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029

Tujuan	Sasaran	IKU	Formulasi	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bekasi Barat		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden.	85.58	86.12	86.69	87.27	87.86	88.47	
	1.1 Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Barat	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	(Jumlah LKM yang mendukung pelayanan publik / Jumlah total LKM) x 100%	70%	72%	74%	77%	80%	83%	Hasil Perhitungan dan Pelaporan
	1.2 Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Barat	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai IKM tahun N - Nilai IKM tahun (N-1) / Nilai IKM tahun (N-1) x 100 %	0.64%	0.65%	0.66%	0.67%	0.68%	0.69%	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Sumber : RENSTRA 2025-2029 Kecamatan Bekasi Barat

A. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Barat

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam mengukur peningkatan kinerja di Kecamatan Bekasi Barat digunakan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Sedangkan untuk mengukur peningkatan layanan kepada masyarakat digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik.

**Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Barat
Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN/ RUMUS	PENANGGUNG JAWAB	TARGET TAHUN 2025
1	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik di Kecamatan Bekasi Barat	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat (BLPU)	Nilai	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP = Nilai Komponen perencanaan kinerja + nilai komponen evaluasi internal + nilai komponen capaian kinerja	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan 2. Seksi Pemerintahan 3. Seksi Kesejahteraan Sosial 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 5. Bagian Tata Usaha 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	42
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan. Kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan public. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui Kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan Kecamatan Bekasi Barat adalah yang	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan 2. Bagian Tata Usaha	82.5



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

					menerima layanan		
3	Terwujudnya Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di wilayah Kecamatan Bekasi Barat	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	Persen (%)	Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan antara ketertiban, kebersihan dan keindahan.	(Jumlah zonasi yang telah ditertibkan / Jumlah. Zona tertib) x 100%	1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	80

Sumber data : Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD, Renstra Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024-2026

**Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Bekasi Barat Renstra Tahun 2025-2029**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	TARGET KINERJA SASARAN	SUMBER DATA
				FORMULASI/CARA PENGUKURAN	2025	
1	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Barat	Persentase LKM Aktif yang Mendukung pelayanan publik	Persentase	(Jumlah LKM yang membuat Laporan /Jumlah LKM) x 100%	70%	Hasil Perhitungan dan Laporan
2	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Barat	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persentase	Nilai IKM tahun N - Nilai IKM tahun (N-1)/ Nilai IKM tahun (N-1) x 100 %	0.64%	Hasil Perhitungan dan Laporan

Sumber : Renstra Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029

2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025

Dokumen Rencana Strategi selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan. Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu



dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan RPD 2024-2026)

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025 merupakan target kinerja tahun kedua dari Renstra Kecamatan Bekasi Barat 2024-2026 dan Renja Tahun 2025. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Tabel 2.5, dan Alokasi Anggaran pertriwulan Tabel 2.6

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bekasi Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82.5
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bekasi Barat	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat	Nilai	40
3.	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Bekasi Barat	Pesentase Wilayah yang Tertib di Kecamatan Bekasi Barat	Persen	57%

Sumber data : Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025 Kecamatan Bekasi Barat



Tabel 2.6 Lampiran Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025

No.	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 25.821.847.680	PAD dan DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 425.000.000	PAD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 12.725.563.650	PAD dan DAU
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 40.000.000	PAD
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.476.233.000	PAD

Sumber data : Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun Kecamatan Bekasi Barat

B. Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2025 (berdasarkan RPJMD 2025-2029)

Selanjutnya Perjanjian Kinerja pada Perubahan APBD Tahun 2025 Kecamatan Bekasi Barat merupakan target kinerja sesuai dengan Renstra 2025 – 2029 dan Perubahan Renja Tahun 2025. Target kinerja tersebut dijabarkan dalam target per triwulan sebagai bahan evaluasi per triwulan. Perjanjian Kinerja pada APBD Perubahan tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.7, dan Alokasi Anggaran Pertriwulan Tabel 2.8.

**Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Pada APBD Perubahan Tahun 2025
Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN
1	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Barat	Persentase LKM Aktif yang Mendukung pelayanan publik	Persen (%)	70%
2	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Barat	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persen (%)	0.64%

Sumber data : Perjanjian Kinerja Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025



**Tabel 2.8 Lampiran Perjanjian Kinerja Pada APBD Perubahan
Tahun 2025**

No.	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 25.428.581.680	PAD dan DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 387.735.000	PAD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 20.733.908.800	PAD dan DAU
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 38.312.000	PAD
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.439.675.000	PAD

Sumber data : Lampiran Perjanjian Kinerja pada APBD Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Bekasi Barat

Pada tahun 2025, Kecamatan Bekasi Barat focus pada dua janji utama yang akan diwujudkan, yaitu :

1. Pemberdayaan LKM : Kami menargetkan 70% LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) aktif berperan dalam mendukung pelayanan publik. Hal ini penting agar aspirasi dan kebutuhan Masyarakat Tingkat RT/RW dapat tersampaikan dan ditangani dengan baik.
2. Peningkatan Kepuasan Masyarakat : Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki layanan. Target kami adalah adanya Peningkatan Kepuasan Masyarakat sebesar 0.64% dari pencapaian sebelumnya. Meski angka ini terlihat kecil, namun mencerminkan Upaya keras kami untuk terus memberikan kepuasan ekstra kepada warga di Tengah standar pelayanan yang sudah ada.

Untuk memastikan target-target di atas bukan sekedar angka, Pemerintah Kota Bekasi memberikan dukungan anggaran yang dikelola melalui 5 program utama di Kecamatan Bekasi Barat dengan total alokasi Rp. 48.028.207.480 (empat puluh delapan miliar dua puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Total anggaran tersebut akan digunakan secara transparan dan akuntabel untuk mendukung wajah baru Kecamatan Bekasi Barat yang lebih estetik, modern, dan melayani. Dengan dukungan dana ini, kami optimis seluruh target kinerja yang telah dijanjikan dapat tercapai dengan baik di akhir tahun 2025.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah. Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator.

3.1 Capaian Kinerja

Pada sub ini, dilakukan analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Barat untuk tahun anggaran 2025. Karena Tahun 2025 merupakan masa transisi. Maka analisis ini melibatkan dua dokumen perencanaan strategis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang merupakan perencanaan transisi/menengah, dan Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang merupakan perencanaan periode kepemimpinan baru, serta pengukuran pencapaian kinerja setiap indikatornya



dengan metode perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target. Hasil pengukuran pencapaian kinerja memberikan gambaran keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi selama Tahun 2025.

A. Analisis Capaian Berdasarkan Renstra 2024 – 2026

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Renstra 2024 – 2026, fokus utama Kecamatan Bekasi Barat pada tahun 2025 adalah pada fokus utamanya adalah peningkatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, peningkatan ketertiban umum. Secara umum, capaian kinerja terhadap target 2024 – 2026 dan Renja Tahun 2025 menunjukkan tren yang positif. Berikut adalah ringkasan perbandingannya :

**Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
				2025	2025	2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bekasi Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,56	82.3	96.19%
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bekasi Barat	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat	Nilai	40	63.78	159.45%
3	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Bekasi Barat	Pesentase Wilayah yang Tertib di Kecamatan Bekasi Barat	Persen	57%	57%	100%

Sumber data : Analisis Kecamatan Bekasi Barat, Tahun 2025

Pengukuran kinerja terhadap target, realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 telah dicapai berdasarkan Renstra Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024 – 2026.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik;

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maupun Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka disusun Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.



Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi sebagai salah satu penyedia layanan publik pada Pemerintah Kota Bekasi, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
				2025	2025	2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bekasi Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82.5	82.3	99.75%

Sumber data : Hasil Survey IKM Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025

Dengan melihat tabel tersebut diatas, capaian indikator kinerja yang pertama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik pada Tahun 2025 mempunyai target 82.5 dengan realisasi sebesar 82.3, maka capaian kinerja Tahun 2025 atas indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik Kecamatan Bekasi Barat sebesar 99.75 persen yang dapat diartikan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik pada Tahun 2025 tidak memenuhi target.



Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual dan e-kuesioner (tautan dan kode QR) yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat 9 (sembilan) unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan dalam kuesioner terdiri dari :

1. Kemudahan Persyaratan Pelayanan;
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan;
3. Ketepatan WaktuPenyelesaian;
4. Kesesuaian Biaya/Tarif;
5. Kesesuaian Peraturan (Hasil pelayanan dengan ketentuan yang ditetapkan);
6. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan sarana dan masukan;
9. Kecukupan/keefektifan sarana informasi/pengaduan.

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di Kota Bekasi, indikator Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM Baik. Pada Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025 terhadap 8 jenis layanan publik di lingkungan Kecamatan Bekasi Barat. Untuk melihat nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Nilai IKM Triwulan I Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per unsur pada Kecamatan Bekasi Barat

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai Rata-Rata (NRR)	3.318	3.261	3.205	3.250	3.216	3.193	3.216	3.148	3.659
IKM Per Unsur (NRR x 25)	82.95	81.53	80.13	81.25	80.4	79.83	80.4	78.7	91.48
Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	81.85 (Baik)								

Sumber data : Laporan SKM Triwulan I Tahun 2025 Kec. Bekasi Barat



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

Tabel 3.4 Nilai IKM Triwulan II Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per unsur pada Kecamatan Bekasi Barat

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai Rata-Rata (NRR)	3.282	3.282	3.236	3.136	3.282	3.282	3.182	3.173	3.682
IKM Per Unsur (NRR x 25)	82.05	82.05	80.90	78.40	82.05	82.05	79.55	79.33	92.05
Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	A
IKM Unit Layanan	82.05 (BAIK)								

Sumber data : Laporan SKM Triwulan II Tahun 2025 Kec. Bekasi Barat

Tabel 3.5 Nilai IKM Triwulan III Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per unsur pada Kecamatan Bekasi Barat

No	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Sarpras	Pengaduan	IKM Per Jenis Layanan
1	Penerbitan Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal	36	81.25	83.33	80.55	80.55	83.33	81.95	77.08	78.48	89.58	81.79
2	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	19	78.95	84.20	78.95	80.28	78.95	80.28	76.33	78.95	90.80	80.85
3	Surat Keterangan Domisili Yayasan Pendidikan	11	84.10	84.10	79.55	81.83	84.10	81.83	81.83	79.55	88.65	82.83
4	Surat Keterangan Dispensasi Nikah	10	90.00	95.00	92.50	82.50	92.50	95.00	92.50	92.50	97.50	92.22
5	Surat Keterangan Nikah Non Muslim	8	87.50	87.50	87.50	93.75	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	89.93
6	Surat Keterangan Domisili Haji	5	80.00	80.00	80.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	80.00	77.22
7	Surat Keterangan Izin Rame-rame	3	91.68	91.68	83.33	83.33	91.68	91.68	91.68	83.33	91.68	88.89
8	Surat Keterangan Rekomendasi Pendirian Rumah Tinggal	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Rerata IKM Per Unsur			83.08	85.48	82.25	82	84.15	83.88	80.93	81.45	90.33	
IKM Unit Layanan			83.72									
Mutu unit Layanan			B									

Sumber data : Laporan SKM Triwulan III Tahun 2025 Kec. Bekasi Barat



Tabel 3.6 Nilai IKM Triwulan IV Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per unsur pada Kecamatan Bekasi Barat

No	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Sarpras	Pengaduan	IKM Per Jenis Layanan
1	Penerbitan Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal	4	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	75	87.5	81.25
2	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	3	83.33	83.33	75	75	83.33	75	75	75	91.68	79.63
3	Penerbitan Surat Pernyataan Ahli Waris	3	75.00	91.68	83.33	83.33	91.68	83.33	83.33	91.68	91.68	86.11
4	Surat Keterangan Belum Nikah	1	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
5	Surat Keterangan Domisili Haji	2	87.50	87.50	75.00	87.50	87.50	75.00	75.00	87.50	87.50	83.33
6	Surat Keterangan Domisili Yayasan/Organisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Surat Keterangan Izin Rame-rame	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Surat Keterangan Rekomendasi Pendirian Rumah Tinggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Penerbitan Rekomendasi Nikah Non-Muslim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rerata IKM Per Unsur			80.78	84.63	78.85	80.78	84.63	78.85	78.85	80.78	88.48	
IKM Unit Layanan			81.84									
Mutu unit Layanan			B									

Sumber data : Laporan SKM Triwulan IV Tahun 2025 Kec. Bekasi Barat

Berdasarkan hasil pengolahan data nilai IKM Tahun 2025, Triwulan I memperoleh nilai IKM sebesar 81.85, Triwulan II memperoleh nilai IKM sebesar 82.05, Triwulan III memperoleh nilai SKM sebesar 83.72, Triwulan IV memperoleh nilai IKM sebesar 81.84. Hasil survei pada triwulan IV mengalami penurunan, dikarenakan masa pengambilan survei yang singkat, yakni di bulan Oktober Tahun 2025 saja. Sehingga pelayanan di bulan November dan Desember tidak masuk hitungan. Dari tabel diatas untuk Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki nilai sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi nilai IKM}}{4}$$

$$= \frac{(81.85+82.05+83.72+81.84)}{4}$$

$$= 82,3 \text{ (Nilai IKM Tahun 2025)}$$

Capaian IKM Tahun 2025 dapat dihitung sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi nilai IKM}}{\text{Target IKM}} \times 100\%$$

$$= \frac{82,3}{85,56} \times 100\%$$

$$= 96,19 \% \text{ (Capaian IKM Tahun 2025)}$$



Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan, Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi pada tahun 2025.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Bekasi Barat telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Surat Tugas Inspektur Kota Bekasi Nomor 800.1.11.1/708/ITKO.Set tanggal 19 September 2025. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi tersebut adalah untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai target implementasi SAKIP dan menilai tingkat akuntabilitas kinerja, serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor : 700.1.2.1/191-LHE/ITKO.Set menunjukkan bahwa Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi memperoleh nilai 63.78 atau kategori "B" dengan inteprestasi Baik.

Adapun perhitungan pencapaian nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Capaian Nilai LHE AKIP}}{\text{Target Nilai LHE AKIP}} \times 100\%$$

$$= 63.78/40 \times 100\%$$

$$= 159.45\%$$

Maka analisis persentase capaian yang meningkat di Kecamatan Bekasi Barat dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.7 Analisis Capaian Kinerja Target dan Realisasi Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
				2025	2025	2025
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bekasi Barat	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat	Nilai	40	63.78	159.45%

Sumber data : LHE AKIP Pada Kecamatan Bekasi Barat Th. 2025 Nomor: 700.1.2.1/191.LHE/ITKO.Set

Dengan melihat table tersebut diatas bahwa target Tahun 2025 sebesar 40 sementara realisasi mencapai 63.78 maka capaian kinerja Tahun 2025 atas indikator Sasaran Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat sebesar 159.45 persen. Melampauinya target nilai AKIP menunjukkan bahwa Kecamatan Bekasi Barat telah berhasil mengimplementasikan system manajemen kinerja yang terukur. Keberhasilan ini mencerminkan adanya keselarasan yang baik antara perencanaan anggaran dan output kegiatan. Hal ini juga menandakan bahwa pengawasan internal pelaporan kinerja dilakukan secara periodik dan akurat. Penilaian tersebut juga disertai beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.

Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan realisasi dan capaian kinerja Nilai AKIP tahun 2025 dengan beberapa tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.8

Perbandingan Akumulasi Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, 2024, dan 2025

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target			Realisasi			Capaian (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat	Nilai	40	40	40	63.41	62.81	63.78	158.52%	157.025%	159.45%
Peningkatan Realisasi dan Capaian						-	-1	0.97	-	-1,49%	2,42%

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Tahun 2023 ke 2025 menunjukkan tren yang berbeda seperti pada tahun 2024 mengalami tren menurun, sedangkan pada tahun 2025 menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2024.



3. Persentase Peningkatan Wilayah Tertib

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum, Ketertiban dan Keindahan bahwa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan antara ketertiban, kebersihan dan keindahan. Pembangunan suatu Kota akan terwujud dan dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat dalam kondisi yang baik, bersih, indah dan cermin adanya kebersihan, keindahan dan ketertiban merupakan modal bagi suatu pembangunan.

Kecamatan Bekasi Barat sebagai salah satu Kecamatan yang ada di Kota Bekasi sekaligus Kecamatan yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara Republik Indonesia menjadi cerminan Kota Bekasi terutama dalam hal penerapan wilayah tertib.

Terdapat 3 titik yang ditetapkan sebagai target pada Tahun 2025. Zona tertib tersebut ditetapkan sebagai target pada tahun 2025. Zona tertib tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan

B. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra 2025 – 2029

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029, fokus utama Kecamatan Bekasi Barat pada tahun 2025 adalah penguatan kemitraan dengan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan peningkatan kualitas layanan publik di wilayah Kecamatan. Secara umum, capaian kinerja terhadap target Renstra 2025-2029 dan Perubahan Renja Tahun 2025 menunjukkan tren yang positif. Berikut adalah ringkasan perbandingannya :

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025

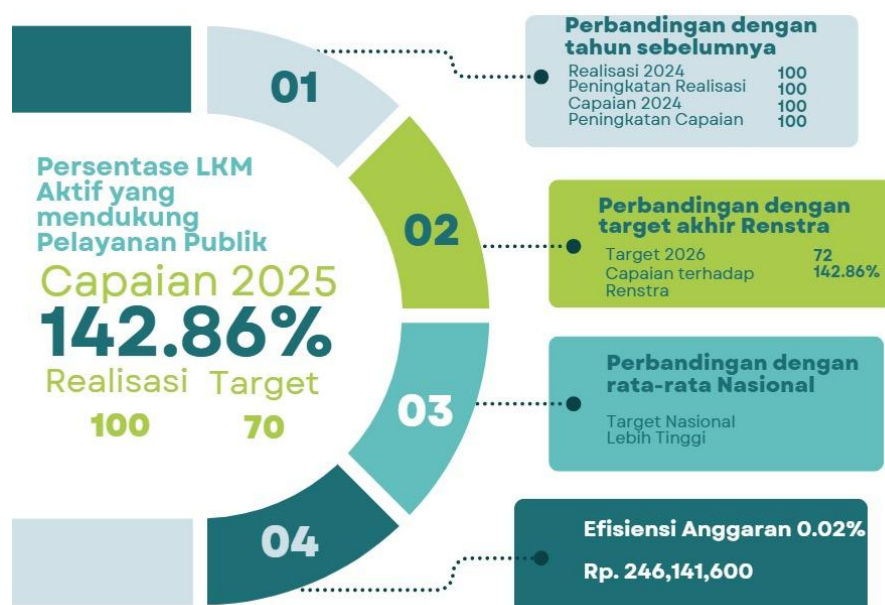
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Barat	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Persentase	70%	100%	142.86%
2	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Barat	Persentase peningkatan kepuasan masyarakat di kecamatan	Persentase	0.64%	-3,2%	96,19%

Sumber Data : Analisis Kecamatan Bekasi Barat, Tahun 2025



Pengukuran kinerja terhadap target, realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 telah dicapai berdasarkan Renstra Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 menunjukkan trend yang meningkat pada indikator persentase LKM aktif dan mengalami penurunan pada indikator persentase peningkatan kepuasan masyarakat, dimana capaian setiap Indikator Kinerja Utama belum semuanya dapat tercapai. Berikut adalah rincian analisis capaiannya:

1. Persentase LKM Aktif Yang Mendukung Pelayanan Publik



Dalam rangka mengakselerasi program prioritas Pemerintah Pusat dan Wali Kota Bekasi khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, penguatan pertumbuhan ekonomi, serta percepatan penurunan angka stunting. Kecamatan Bekasi Barat mengoptimalkan tugas dan fungsi pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan. Langkah strategis ini ditempuh guna memperkuat sinergi partisipatif dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat basis. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menegaskan bahwa LPM/LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan) bertugas membantu Pemerintah



Kelurahan dan Kecamatan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta meningkatkan pelayanan publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, memberi mandat bagi Lembaga kemasyarakatan (termasuk LPM) untuk terlibat aktif dalam pengusulan dan pengawasan kegiatan yang dibiayai oleh dana kelurahan.

a) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Kinerja Tahun Ini

Capaian realisasi kinerja indikator Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik di tahun 2025 diperoleh dari kontribusi unsur LKM yang ada di wilayah Kecamatan Bekasi Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3.10 Kontribusi Unsur LKM Tahun 2025

No	Unsur LKM	Jumlah Unsur LKM	Jumlah Unsur LKM yang Aktif	Kontribusi
1.	PKK	6	6	- Kader PKK mendorong kemandirian pangan melalui memanfaatkan pekarangan untuk tanaman sayuran dan sumber protein, melakukan pelatihan pengelolaan makanan bergizi berbasis bahan baku lokal; - Kader PKK menyuplai data kondisi warga yang memenuhi kriteria rumah (sehat/kurang sehat), sumber air, jumlah jamban dsb.
2.	Posyandu	179	179	- Kader Posyandu menyuplai data by name by address mengenai balita stunting dan ibu hamil KEK (Kekurangan energi Kronis). Data ini diintegrasikan baik melalui WhatsApp Group dengan Puskesmas yang diintegrasikan ke Web Aksi Bangsa Kemendagri; - Melaksanakan kegiatan 6 Standar Pelayanan Minimal (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Sosial.
3.	LPM	5	5	Mensinkronkan data usulan pembangunan (Musrenbang) dengan kondisi lingkungan di wilayah kumuh/lokasi fokus stunting, sehingga perbaikan drainase atau sanitasi tepat lokasi.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

No	Unsur LKM	Jumlah Unsur LKM	Jumlah Unsur LKM yang Aktif	Kontribusi
4.	BKM	5	5	Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan, serta menyediakan data basis ekonomi warga prasejahtera yang layak menerima dana bergulir.
5.	RW	92	92	- Laporan Aminduk perTriwulan - Pengelolaan sampah - Penataan Lingkungan RW Keren
6.	RT	749	749	Melakukan verifikasi faktual door to door terhadap kondisi sosial ekonomi warga
Total Unsur LKM		1.036	1.036	

Sumber data : Hasil Laporan Unsur LKM Kecamatan Bekasi Barat, tahun 2025

Berdasarkan hasil laporan dari beberapa unsur LKM sampai dengan akhir Desember 2025, maka capaian realisasi persentase LKM yang aktif mendukung pelayanan publik dapat ditung sebagai berikut:

$$\text{Persentase LKM aktif} = \frac{\text{Jumlah LKM aktif yang mendukung pelayanan publik}}{\text{Jumlah LKM yang ada}} \times 100 \%$$

$$\text{Persentase LKM aktif} = \frac{1.036}{1.036} \times 100\%$$

$$\text{Persentase LKM aktif} = 100\%$$

Dari hasil perhitungan rumus diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase LKM aktif yang mendukung pelayanan publik telah melampaui target yang ditetapkan di Tahun 2025 yaitu 70 persen. Rasio capaian target telah melampaui angka yang telah ditetapkan. Maka analisa capaian indikator kinerja persentase LKM aktif yang mendukung pelayanan publik Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.11 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Persentase Lkm Aktif Yang Mendukung Pelayanan Publik**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Persen	70%	100%	142.86%

Sumber data: Analisis Kecamatan Bekasi Barat, 2025

Indikator Persentase Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) aktif yang mendukung Pelayanan Publik pada tahun 2025 berhasil mencapai realisasi sebesar 100%,



melampaui target yang ditetapkan sebesar 70%. Perlu ditekankan bahwa meskipun indikator ini merupakan hasil perumusan baru dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, namun secara faktual, berbagai unsur Lembaga Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Barat telah menunjukkan keaktifan dalam sinergi yang berkelanjutan bahkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Penetapan indikator ini dalam dokumen perencanaan terbaru berfungsi sebagai formalisasi atas praktik (best practice) yang telah berjalan. Mengingat rekam jejak aktifitas pendampingan pelayanan publik telah terdokumentasi dengan baik sejak awal tahun, maka realisasi kinerja pada akhir tahun 2025 memiliki basis data yang valid dan akuntabel untuk dihitung secara menyeluruh.

Keaktifan 100% unsur LKM yang terdiri dari RT/RW, LPM, BKM, PKK dan Posyandu memberikan kontribusi fundamental terhadap akurasi data kewilayahan. Sinergi ini memastikan program prioritas Wali Kota Bekasi dan Pemerintah Pusat dapat dieksekusi dengan baik:

- **Penurunan Stunting:** data by name by address dari posyandu memastikan intervensi gizi tepat sasaran pada balita beresiko, kader PKK berperan sebagai fasilitator di tingkat keluarga yang mendorong kemandirian pangan di tingkat keluarga;
- **Pengentasan Kemiskinan:** validasi faktual dari RT/RW dan BKM meminimalisir kesalahan sasaran penerima manfaat bantuan sosial. Kemudian pengelolaan sampah di tingkat RW melibatkan warga lokal (sering kali kelompok masyarakat berpenghasilan rendah) sebagai petugas kebersihan atau pengelola Bank Sampah yang dibayar melalui iuran swadaya yang di kelola secara lebih professional berkat dukungan infrastruktur dana hibah.
- **Pertumbuhan Ekonomi:** LPM memfasilitasi pendataan UMKN lokal untuk mendapatkan legalitas usaha dan sertifikat halal, yang berdampak pada peningkatan produktivitas ekonomi wilayah.

b) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk melihat konsistensi dan perkembangan peran Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di Kecamatan Bekasi Barat, dilakukan analisis perbandingan antara capaian tahun 2025 dengan periode Renstra sebelumnya (2018-2023).



Tabel 3.12 Perbandingan Akumulasi Realisasi Kinerja Sasaran Persentase LKM Aktif Yang Mendukung Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target					Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase	60%	60%	60%	-	-	60%	60%	60%	-	-
	Persentase LKM Aktif Yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	100%

Sumber data: LKIP Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2021, 2022, dan 2023

Pada periode 2021-2023, keterlibatan LKM (LPM, RT/RW, PKK, Posyandu) difokuskan pada pemulihan pasca pandemi dan penguatan infrastruktur kewilayahan. Meskipun realisasi pada tahun-tahun tersebut menunjukkan tren positif, pengukuran kinerja masih bersifat umum dan belum spesifik mengunci variabel “dukungan terhadap pelayanan publik” sebagai indikator kinerja utama.

Pada tahun 2024, terdapat kekosongan pelaporan untuk indikator ini. Hal ini disebabkan oleh penerapan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 yang disusun untuk mengisi masa transisi kepemimpinan daerah. Dalam dokumen tersebut, indikator spesifik mengenai persentase LKM aktif tidak dicantumkan dalam matriks kinerja Kecamatan, sehingga secara administratif tidak dilakukan pengukuran formal. Namun, secara faktual, aktivitas LKM di lapangan tetap berjalan sebagai bentuk keberlanjutan fungsi kemasyarakatan.

Memasuki tahun 2025, indikator ini dimunculkan kembali dengan rumusan yang lebih tajam dalam Renstra 2025-2029. Realisasi yang mencapai 100% (melampaui target 70%) menunjukkan adanya lonjakan efektivitas pembinaan.

c) Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk memahami tren keberhasilan Kecamatan Bekasi Barat dalam menggerakkan potensi masyarakat, dilakukan analisis perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Analisis ini memberikan gambaran bagaimana efektivitas



pembinaan LKM (Lembaga Kemasyarakatan Majelis) mengalami transformasi yang signifikan.

Tabel 3.13 Perbandingan Akumulasi Capaian Kinerja Sasaran
Persentase LKM Aktif Yang Mendukung Pelayanan Publik dengan Capaian Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian (%)				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase	100%	100%	100%	-	-
	Persentase LKM Aktif Yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase	-	-	-	-	100%

Sumber data: LKIP Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2021, 2022, dan 2023

Pada rentang tahun 2021 hingga 2023, kinerja kecamatan dinilai melalui indikator "Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat". Selama tiga tahun berturut-turut, Kecamatan Bekasi Barat berhasil menjaga stabilitas kinerjanya dengan capaian konstan diangka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam pembangunan dasar dan pemulihan pascapandemi di wilayah Bekasi Barat telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pada tahun 2024, terdapat kekosongan data capaian untuk indikator ini. Hal tersebut merupakan implikasi dari masa transisi perencanaan daerah (RPD 2024-2026), di mana terjadi penyesuaian administratif yang menyebabkan indikator mengenai LKM tidak dimunculkan dalam matriks kinerja tahunan. Namun demikian, secara operasional di lapangan, pembinaan terhadap RT, RW, dan elemen LKM lainnya tetap berjalan guna menjaga stabilitas pelayanan di lingkungan masyarakat.

Tahun 2025 menjadi titik balik penting dengan diberlakukannya Renstra 2025-2029. Indikator kinerja dipertajam menjadi "Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik". Hasilnya sangat positif:

- Target: 70%
- Realisasi: 100%
- Capaian Kinerja: 142,86%

Capaian sebesar 142,86% ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bekasi Barat tidak hanya berhasil melampaui target yang ditetapkan, tetapi juga berhasil mengaktivasi seluruh potensi LKM (100% aktif) untuk terlibat langsung dalam pelayanan publik. Lonjakan ini



membuktikan bahwa strategi pembinaan yang baru jauh lebih efektif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan ini menunjukkan adanya tren positif di mana Kecamatan Bekasi Barat berhasil mengubah pola pemberdayaan masyarakat yang bersifat umum (pada 2021-2023) menjadi dukungan pelayanan publik yang lebih nyata dan terukur di tahun 2025.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis 2025-2029

Tidak hanya membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Kecamatan Bekasi Barat juga melihat sejauh mana pencapaian tahun 2025 ini berkontribusi terhadap target akhir "garis finish" di tahun 2029.

**Tabel 3.14 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik Target Akhir
Renstra 2025-2029**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	
		2025	2029
Target	Persen	70%	80%
Realisasi	Persen	100%	-
Capaian terhadap Renstra	Persen	125%	

Sumber Data: Analisa Kecamatan Bekasi Barat, 2025

Target Akhir Jangka Panjang (Tahun 2029): Pemerintah Kecamatan sebenarnya mematok target bertahap hingga angka 80% di akhir tahun 2029 untuk persentase LKM aktif. Realisasi Tahun Pertama (Tahun 2025): Di luar dugaan, pada tahun 2025 ini realisasi keterlibatan LKM sudah menyentuh angka 100%. Capaian terhadap Target Renstra: Jika dihitung terhadap target akhir tahun 2029, maka kinerja Kecamatan Bekasi Barat saat ini sudah mencapai 125%.

Angka 125% menunjukkan bahwa Kecamatan Bekasi Barat telah berhasil melampaui target lima tahunan hanya dalam waktu satu tahun. Pencapaian ini membuktikan bahwa antusiasme dan keaktifan LKM di wilayah Bekasi Barat dalam mendukung pelayanan publik jauh lebih tinggi dari ekspektasi awal.



Dengan hasil yang sudah mencapai 100% di tahun pertama, tantangan bagi Kecamatan Bekasi Barat ke depan adalah bukan lagi sekadar "meningkatkan jumlah", melainkan "menjaga konsistensi" dan kualitas keaktifan LKM tersebut agar tetap maksimal hingga akhir periode di tahun 2029 nanti.

e) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Mengingat indikator "Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik" merupakan indikator spesifik kewilayahan yang dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Bekasi Barat, maka evaluasi capaiannya dilakukan melalui analisis relevansi terhadap sasaran strategis nasional dalam RPJMN 2025-2029. Meskipun tidak terdapat pembandingan angka (kuantitatif) yang serupa secara langsung di level nasional, realisasi 100% LKM Aktif di Kecamatan Bekasi Barat merupakan kontribusi fundamental terhadap dua pilar utama RPJMN:

1. Pendukung Transformasi Tata Kelola (Sasaran Nasional ke-13)

Keaktifan 100% LKM (RT/RW, LPM, BKM, PKK, dan Posyandu) di Kecamatan Bekasi Barat merupakan wujud dari strategi nasional dalam memperkuat Partisipasi Masyarakat sebagai pilar tata kelola. Realisasi ini membuktikan bahwa Kecamatan Bekasi Barat telah berhasil menggerakkan modal sosial untuk mendukung pelayanan publik.

2. Penguatan Akurasi Data Nasional (Satu Data Indonesia)

Realisasi 100% LKM yang aktif menyuplai data by name by address di Bekasi Barat adalah solusi nyata terhadap mandat RPJMN mengenai Akurasi Data Penanggulangan Kemiskinan. Melalui dukungan kader LKM, Kecamatan telah menjalankan fungsi verifikasi lapangan yang membantu pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kebijakan yang tepat sasaran (presisi), selaras dengan semangat Satu Data Indonesia

3. Peningkatan Indeks Pelayanan Publik Secara Nasional

Sinergi antara keaktifan LKM dan peningkatan kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa Kecamatan Bekasi Barat telah melampaui standar minimal pelayanan publik yang diamanatkan dalam RPJMN. Realisasi ini menjadi bukti bahwa instrumen kemasyarakatan adalah katalisator utama dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan prima yang dicanangkan pemerintah pusat.



f) Analisa Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

Analisa penyebab keberhasilan serta peningkatan kinerja indikator Persentase LKM aktif yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Bekasi Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas SDM

Aktivasi LKM (seperti RT, RW, PKK, BKM dan LPM) sangat bergantung pada pemahaman pengurus terhadap tugas pokok dan fungsinya, sehingga Kecamatan Bekasi Barat konsisten untuk meningkatkan kompetensi manajerial pengurus LKM melalui pembinaan rutin. Selain itu dengan adanya implementasi system pelaporan berbasis aplikasi (seperti SIMPOKASI) memudahkan kader posyandu melaporkan kegiatan secara real-time.

2. Kepemimpinan yang kolaboratif

Camat dan Lurah berperan aktif sebagai fasilitator yang mampu merangkul tokoh masyarakat melalui berbagai macam kegiatan dan program yang telah dilaksanakan seperti pertemuan yang melibatkan RT/RW dan tokoh Masyarakat serta forkopincam dari bulan Januari s/d November, serta pertemuan terbaru di Desember 2025 yaitu Camat Gebug Kampung (Gerebeg dan Rembug). Kedua pertemuan tersebut sama-sama bertujuan untuk berdialog langsung dengan warga masyarakat dan unsur LKM khususnya untuk dapat meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Bekasi Barat. Pertemuan ini penting karena hubungan yang harmonis antara birokrasi dan Lembaga kemasyarakatan menghilangkan hambatan komunikasi, sehingga program kerja pemerintah cepat terserap ke level akar rumput.

3. Sistem Insentif

Adanya pemberian insentif yang tepat waktu bagi unsur LKM memotivasi mereka untuk meningkatkan keaktifannya;

4. Pemberdayaan UMKN

Melalui PKK dan LPM, muncul klaster-klaster UMKN di tingkat Kelurahan. Melalui PKK dan Seksi Ekonomi dan Pembangunan di Kecamatan memfasilitasi serta mempermudah izin usaha (NIB), sertifikat halal, sosialisasi dalam mengemas produk agar lebih menarik serta fasilitasi pameran produk local di tingkat Kecamatan Bekasi Barat.



Mengingat realisasi kinerja sudah tinggi, maka di tahun 2026 Kecamatan Bekasi Barat perlu melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Audit sosial berbasis warga, yaitu dengan melibatkan tokoh masyarakat non-LKM untuk mengevaluasi hasil fisik dari dana hibah Rp. 100 juta. Misalnya apakah lampu jalan yang di pasang berkualitas baik? Apakah taman yang dibangun terawat?
2. Laporan Kinerja Publik, yaitu dengan mempublikasikan realisasi anggaran dan capaian fisik di media sosial kecamatan atau papan pengumuman kelurahan agar warga memiliki (sense of ownership) terhadap pembangunan tersebut;
3. Peningkatan Kapasitas Kader LKM, agar LKM tidak hanya aktif secara administrasi tapi juga aktif secara substantif yaitu dengan memberikan pelatihan khusus sesuai kebutuhan wilayah seperti
 - Kelurahan Pejuang (industri) berupa pelatihan kewirausahaan
 - Kelurahan Kalibaru/Bekasi Barat/Harapan Mulya berupa pelatihan pengelolaan sampah modern.
4. Memastikan dana Bekasi Keren tidak berhenti di pembangunan fisik saja, tapi menghasilkan putaran ekonomi

g) Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.15 Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Persentase LKM Aktif Yang Mendukung Pelayanan Publik

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA
					Rp.	(%)	
Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		13.065.563.650	20.711.403.800	20.469.858.346	98.83	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		12.865.563.650	20.511.403.800	20.269.858.346	98.82	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		120.000.000	120.000.000	114.632.500	95.53	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan	171.273.000	158.676.000	142.045.600	89.52	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bintara	1.901.751.800	3.740.846.800	3.736.695.396	99.89	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bintarajaya	1.604.436.000	3.105.761.000	3.102.024.800	99.88	100%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA
					Rp.	(%)	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kranji	1.462.134.000	3.156.832.000	3.055.682.000	96.80	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kotabaru	2.103.276.400	4.463.584.400	4.361.674.400	97.72	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jakasampurna	2.295.976.200	4.765.703.600	4.757.103.650	99.82	100%
	Pembangunan Sarana Prasana	Kelurahan Bintara	630.000.000	200.000.000	200.000.000	100	100%
	Pembangunan Sarana Prasana	Kelurahan Bintarajaya	650.000.000	200.000.000	200.000.000	100	100%
	Pembangunan Sarana Prasana	Kelurahan Kranji	686.716.250	200.000.000	200.000.000	100	100%
	Pembangunan Sarana Prasana	Kelurahan Kotabaru	650.000.000	200.000.000	200.000.000	100	100%
	Pembangunan Sarana Prasana	Kelurahan Jakasampurna	540.000.000	200.000.000	200.000.000	100	100%
	Evaluasi Kelurahan		50.000.000	0	0	0	0
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		200.000.000	200.000.000	200.000.000	100	100%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bintara	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100	100%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bintarajaya	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100	100%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kranji	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100	100%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kotabaru	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100	100%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Jakasampurna	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100	100%

Sumber data: Siencang e-monev Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025, TW I dan TW IV

Berdasarkan tabel di atas, ada lonjakan pagu anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dari Rp. 13.065.563.650 (pagu anggaran murni) menjadi Rp. 20.711.403.800 (pagu anggaran setelah perubahan), pagu ini naik sekitar 58.52%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan target, tetapi juga memberikan ketersediaan anggaran yang cukup bagi LKM untuk bergerak. Karena tanpa dukungan dana, LKM cenderung pasif. Selain itu, kami telah melakukan optimalisasi anggaran dengan tingkat efisiensi sebesar -1,76% (Rp.712.018.600).

Volume kegiatan yang sangat besar seperti yang ada di Kelurahan Pejuang, memaksa unsur-unsur LKM untuk aktif, karena mereka menjadi pengelola langsung anggaran tersebut. Efektivitas penyerapan dana juga nampak dari hampir seluruh subkegiatan memiliki realisasi di atas 98.83%. Realisasi yang mendekati 100%



menandakan bahwa program yang direncanakan benar-benar dieksekusi di lapangan. Tidak ada dana yang mengendap, yang berarti aktivitas di tingkat RW, seperti penataan lingkungan Bekasi Keren dan operasional LKM lainnya berjalan sesuai jadwal.

Keberhasilan 100% LKM aktif di Kecamatan Bekasi Barat Adalah hasil dari besarnya anggaran dan tingginya penyerapan dana sekitar 99,58%. Hal ini dikarenakan besarnya kenaikan anggran yang drastis pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dan partisipasi masyarakat melalui Musrenbang dan pengelolaan dana hibah RW, yang sehingga pembangunan sarana prasarana dan operasional LKM dapat terealisasi penuh.

h) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian tersebut di atas juga tidak lepas dari efisiensi penggunaan sumber daya berikut analisisnya:

Tabel 3.16 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik

Jenis Sumber Daya	Input (Biaya/Usaha)	Output	Rasio Efisiensi
SDM	Insentif Kader LKM	Cakupan pelayanan 100% wilayah	Sangat tinggi (Biaya rendah, jangkauan luas)
Waktu	Kordinasi digital/WhatsApp	Renspon cepat terhadap masalah warga	Tinggi (memangkas birokrasi manual)
Anggaran	PAD dan Dana Khusus	Penurunan stunting dan kemiskinan	Optimal (output melampaui input finansial)
Fasilitas	Kantor Kelurahan/Kantor RW	Pusat kegiatan ekonomi dan sosial	Maksimal (multi fungsi sarana publik)

Sumber Data: Analisis Kecamatan Bekasi Barat, 2025

1. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kecamatan Bekasi Barat tidak menambah jumlah pegawai birokrasi, melainkan mengoptimalkan modal social melalui LKM. Dengan mengaktifkan 100% LKM (RT, RW, PKK, LPM, BKM), pemerintah mendapatkan “tenaga kerja” tambahan tanpa bebang gaji ASN. Insentif yang diberikan kepada pengurus LKM jauh lebih efisien dibandingkan biaya operasional jika pekerja lapangan dilakukan oleh pihak ketiga atau tim survei professional.

Kader PKK atau Posyandu tidak hanya focus pada Kesehatan (stunting), tetapi juga dilibatkan dalam pendataan kemiskinan dan UMKN. Ini Adalah efisiensi peran, dimana satu orang bisa menjalankan beberapa fungsi intervensi sekaligus.



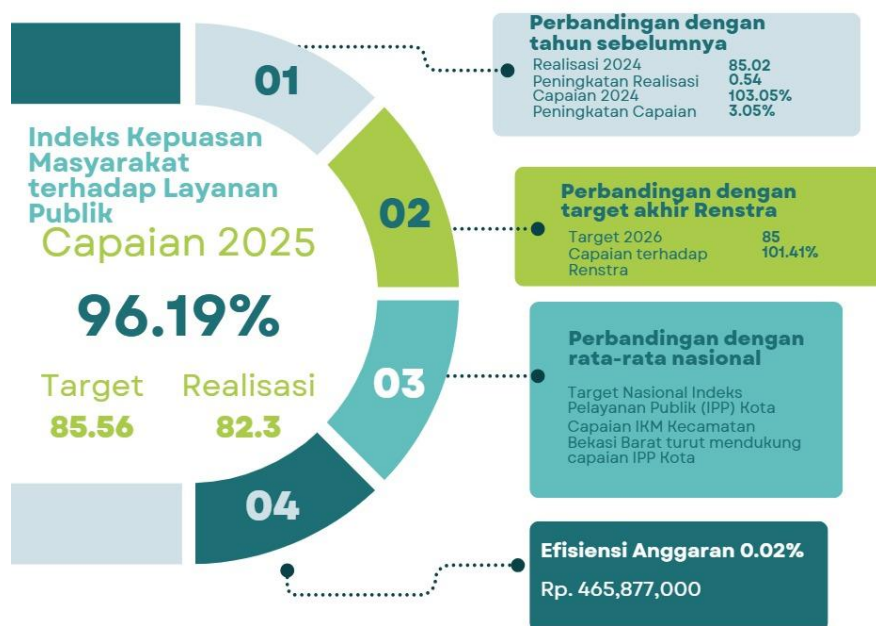
2. Efisiensi Anggaran

Pencapaian ini menggunakan prinsip Konvergensi Anggaran, yaitu penggabungan berbagai sumber dana untuk satu tujuan yang sama, dimana Dana Kelurahan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional LKM secara tepat sasaran, sehingga tidak terjadi tumpang tindik dari Dinas terkait (seperti Dinas Kesehatan untuk stunting)

3. Efisiensi Operasional melalui Digitalisasi

Penggunaan teknologi informasi secara signifikan memangkas biaya dan waktu administrasi, misalnya pelaporan keaktifan LKM melalui aplikasi atau group koordinasi digital mengurangi biaya cetak, kertas dan biaya perjalanan dinas untuk sekadar mengantarkan laporan fisik ke Kecamatan. Selain itu dengan data yang akurat dari LKM yang aktif, bantuan sosial dan intervensi stunting tidak “salah alamat”. Efisiensi ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah benar-benar sampai ke warga yang membutuhkan, sehingga tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia.

2. Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan



a) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Kinerja Tahun Ini

Pada tahun 2025, terjadi perubahan mendasar dalam cara pengukuran kinerja pelayanan publik. Jika pada tahun-tahun sebelumnya fokus utama hanya pada pencapaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara absolut, maka pada



periode Renstra 2025-2029, indikator dipertajam menjadi Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan.

Perubahan ini dilakukan untuk menciptakan budaya kerja yang dinamis. Dengan menargetkan "peningkatan", aparatur Kecamatan Bekasi Barat dituntut untuk tidak sekadar mempertahankan standar yang ada, melainkan terus melakukan inovasi dan perbaikan kualitas layanan dari waktu ke waktu. Hasil perhitungan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.21 Perhitungan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Data Pendukung	Realisasi Tahun 2024 (N-1)	Realisasi Tahun 2025 (N)	Persentase Peningkatan
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bekasi Barat	85,02	82,30	-3,2%

Sumber data: Nilai IKM Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024 dan 2025

Dari tabel di atas, terlihat adanya penurunan nilai IKM dari 85,02 menjadi 82,30. Secara matematis, hal ini menghasilkan penurunan realisasi sebesar -3,2%, jauh dari rata-rata pertumbuhan historis yang diproyeksikan. Dengan realisasi sebesar -3,2% maka persentase capaian terhadap target dapat dihitung sebagai berikut :

Tabel. 3.22 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian 2025
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	0,64%	-3,2%	96,19%

Sumber data: Analisis Kecamatan Bekasi Barat, 2025

Penetapan target 0,64% untuk indikator Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 tidak ditentukan secara acak. Angka ini merupakan hasil kalkulasi teknis yang didasarkan pada rata-rata kenaikan nilai IKM Kecamatan Bekasi Barat selama beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan tren historis,



kenaikan nilai kepuasan masyarakat biasanya bergerak secara linier dan perlahan. Target 0,64% mencerminkan proyeksi pertumbuhan "normal" atau moderat jika Kecamatan menjalankan pelayanan secara rutin seperti tahun-tahun lalu. Namun, dengan realisasi mencapai -3,2%, Kecamatan Bekasi Barat harus lebih konsentrasi pada peningkatan Kepuasan Masyarakat pada tahun-tahun yang akan datang.

b) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.3.23 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Dengan Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target			Realisasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	83	82,5		84.48	85,02	
2	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persen	-	-	0,64%	-	-	-3,2%

Sumber data : Nilai IKM Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2023, 2024 dan 2025

Berdasarkan data pada Tabel 3.23, terlihat adanya tren negatif dalam hal pelayanan kepada warga di Kecamatan Bekasi Barat. Meskipun cara pengukuran (indikator) mengalami penyesuaian pada tahun 2025, namun sumber datanya tetap konsisten menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

c) Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel.3.24 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Dengan Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian (%)		
			2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	101,78%	103,05%	-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

2	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persen	-		96,19%
---	---	--------	---	--	--------

Sumber data: Nilai IKM Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2023, 2024 dan 2025

Angka capaian 96,19% menunjukkan bahwa upaya akselerasi dan inovasi pelayanan yang dilakukan di tahun 2025 memberikan dampak kurang signifikan terhadap kepuasan layanan pada Kecamatan Bekasi Barat, diperlukan peningkatan pelayanan pada tahun-tahun yang akan datang.

d) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis 2025-2029**

Dengan pencapaian 82,3 di awal periode Renstra, Kecamatan Bekasi Barat masih harus berupaya optimal agar dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Jika konsistensi peningkatan 1,56% per tahun dipertahankan, maka target akhir Renstra 2029 akan tercapai pada tahun 2027-2028. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 3.25 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Target Akhir Renstra 2025-2029

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Peningkatan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Kepuasan Masyarakat di Kecamatan
		2025	2029
Target	Persen	0,64%	0,68%
Realisasi	Persen	96,19%	-
Capaian terhadap Renstra	Persen	-3,2%	

Sumber Data: Analisis Kecamatan Bekasi Barat, 2025

e) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, tidak tercantum target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat., namun terdapat target indikator Indeks Pelayanan publik (IPP) baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Kota. Meskipun IKM dan IPP berbeda, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah salah satu komponen dalam penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP). Dalam evaluasi IPP yang dilakukan oleh Kemenpan-RB,



salah satu unsur yang dinilai adalah “Kebijakan Pelayanan” dan “Konsultasi Pengaduan”, dimana hasil survei IKM sering kali dijadikan data dukung untuk membuktikan bahwa kebijakan tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Target IPP tahun 2025 dalam RPJMN 2025-2029 adalah 3.68, dan Indeks Pelayanan Publik Kota adalah 3.96. Sepanjang tahun 2025, unsur pengaduan mendapat nilai paling tinggi, diikuti dengan biaya dan sarpras. Ini menunjukkan konsultasi pengaduan dan kebijakan terkait pengadaan sarpras dan kampanye gratis administrasi telah berhasil. Ini dapat menunjang nilai IPP tingkat Kota.

**Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Bekasi Barat
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan dengan
Standar Nasional (RPJMN Tahun 2025-2029)**

No	Renstra Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025-2029 (Perubahan Renja 2025)						RPJMN 2025-2029		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sasaran	Indikator	Target 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Barat	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persentase	0.64%	-3,2%	96,19%		- Indeks Pelayanan Publik - Indeks Pelayanan Publik Kota	3.68 3.96

Sumber data: Lampiran III RPJMN Tahun 2025-2029

f) Analisa Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan untuk dapat mendukung capaian Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Barat Adalah sebagai berikut:

1. Responsivitas Kanal Pengaduan: Pembukaan kotak pengaduan melalui kontak website dan DM Instagram memungkinkan setiap keluhan



direspons secara cepat. Kecepatan penanganan masalah ini menjadi variabel penentu yang mendongkrak nilai IKM tahun ini.

2. Optimalisasi Program Manjakan Pelayanan: Strategi jemput bola dengan menempatkan petugas layanan langsung di tingkat RW. Hal ini secara signifikan menurunkan cost of access (biaya dan waktu) bagi masyarakat, yang berdampak langsung pada meningkatnya persepsi positif warga. Program Pesona juga memenangkan Juara 1 Lomba Inovasi Daerah Kota Bekasi (Bekasi Innovation Week 2025)
3. Masifnya Sosialisasi Melalui Media Sosial: Informasi layanan disebarluaskan secara luas melalui media sosial Instagram dan pembagian brosur cetak. Langkah ini memastikan setiap lapisan masyarakat mengetahui prosedur dan jenis layanan yang tersedia tanpa melalui perantara.
4. Waktu Pelayanan yang singkat yaitu dengan memberikan kemudahan persyaratan kepada masyarakat mendorong pelayanan dapat dilakukan dengan waktu yang singkat, warga Kecamatan Bekasi Barat memperoleh fasilitas jemput bola yang ada dalam SOP Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat melalui petugas PAMOR Kecamatan Bekasi Barat. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran bagi warga Kecamatan Bekasi Barat untuk senantiasa memperbarui data perubahan jika terdapat penambahan dan pengurangan warga serta dapat berkonsultasi kepada petugas PAMOR Kecamatan Bekasi Barat terkait masalah administrasi kependudukan.
5. Transparansi Digital melalui Website Resmi: Publikasi SOP 8 Pelayanan Utama pada website kecamatan memberikan kepastian hukum dan waktu bagi warga. Kejelasan alur ini meminimalisir kebingungan masyarakat saat mengurus administrasi
6. Penyederhanaan SOP pelayanan, yakni dengan menggabungkan beberapa layanan menjadi satu, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus data kependudukan, contohnya program Mesra Happy yakni layanan kependudukan yang diberikan kepada bayi yang baru lahir meliputi: akte kelahiran, penambahan pada Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA);



7. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai untuk masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, akan tetapi pada Tahun 2025 akan dilakukan perbaikan ruang pelayanan dan ruang tunggu agar masyarakat semakin nyaman dalam mendapatkan pelayanan di Kecamatan Bekasi Barat.

g)Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian

Pernyataan Kinerja

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, indikator ini menggunakan 4 Program dan

11 Kegiatan, yang terdiri dari 1 Program BLPU dan 3 Program BLU.

Adapun rincian program/kegiatan tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.27 Program/Kegiatan penunjang Indikator Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Tahun Anggaran 2025

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA
					Rp.	(%)	
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		425,000,000	387,735,000	362,320,650	93.45%	100%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		40,000,000	-	-	0%	100%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Kelurahan Bintarajaya	40,000,000	-	-	0	0%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		205,000,000	236,075,000	231,510,650	98.07%	100%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan	50,000,000	41,075,000	40,310,000	98.14%	100%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Bintara	20,000,000	20,000,000	19,345,000	96.73%	100%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Bintarajaya	-	40,000,000	39,710,000	99.28%	100%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Kranji	45,000,000	45,000,000	44,760,000	99.47%	100%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Kotabaru	40,000,000	40,000,000	38,691,750	96.73%	100%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan	Kelurahan Jakasampurna	50,000,000	50,000,000	48,693,900	97.39%	100%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA
					Rp.	(%)	
	Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		180,000,000	151,660,000	130,810,000	86.25%	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan	180,000,000	151,660,000	130,810,000	86.25%	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1,476,233,000	1,411,775,000	1,402,403,000	99.34%	100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1,476,233,000	1,411,775,000	1,402,403,000	99.34%	100%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan	80,000,000	50,250,000	46,200,000	91.94%	100%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan	324,733,000	290,025,000	285,965,000	98.60%	100%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Bintara	234,000,000	234,000,000	233,553,000	99.81%	100%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Bintarajaya	170,000,000	170,000,000	169,544,000	99.73%	100%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Kranji	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100.00 %	100%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Kotabaru	193,500,000	193,500,000	193,321,000	99.91%	100%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Jakasampurna	324,000,000	324,000,000	323,820,000	99.94%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		40,000,000	38,312,000	38,312,000	100.00 %	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		40,000,000	38,312,000	38,312,000	100%	100%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan	40,000,000	38,312,000	38,312,000	100.00 %	100%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA
					Rp.	(%)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		25,821,847,680	23,860,723,056	22,218,366,301	93.12%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10,000,000	8,530,000	8,530,000	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan	10,000,000	8,530,000	8,530,000	100.00 %	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15,560,956,000	17,135,649,000	15,716,174,938	91.72%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan	15,550,956,000	17,126,999,000	15,707,524,938	91.71%	100%
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan	10,000,000	8,650,000	8,650,000	100.00 %	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10,000,000	-	-	0%	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan	10,000,000	-	-	0.00%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		495,000,000	485,540,000	466,820,549	96.14%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan	20,000,000	20,000,000	19,636,649	98.18%	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan	240,000,000	240,000,000	236,617,900	98.59%	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan	50,000,000	50,000,000	49,166,000	98.33%	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan	20,000,000	20,000,000	15,600,000	78.00%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan	115,000,000	105,540,000	96,080,000	91.04%	100%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan	50,000,000	50,000,000	49,720,000	99.44%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8,534,891,680	5,397,365,056	5,255,715,730	97.38%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan	404,600,000	438,875,000	426,909,079	97.27%	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan	8,130,291,680	4,958,490,056	4,828,806,651	97.38%	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		395,000,000	54,845,000	53,708,000	97.93%	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	395,000,000	54,845,000	53,708,000	97.93%	100%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA
					Rp.	(%)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		816,000,000	778,794,000	717,417,084	92.12%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan	98,200,000	98,200,000	72,894,909	74.23%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan	167,800,000	167,800,000	134,898,675	80.39%	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	150,000,000	112,794,000	112,426,500	99.67%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan	400,000,000	400,000,000	397,197,000	99.30%	100%

Sumber data: *Siencang e-monev Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025, TW I dan TW IV*

Terdapat korelasi kuat antara penyerapan pada sub-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan warga, dengan kenaikan persepsi kepuasan tersebut. Berikut analisis mendalam mengenai program/kegiatan penunjang keberhasilan tersebut:

1. Program Unggulan: Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik
Koordinasi Pemeliharaan Sapras di 4 Kelurahan (realisasi 97-98%), anggaran sebesar Rp. 50.000.000, per kelurahan diserap optimal. Pemeliharaan sarana umum yang dikelola melalui sinergi ini memberikan dampak visual instan bagi warga. Kepuasan masyarakat meningkat Ketika lingkungan fisik mereka terawat.

Kemudian Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (realisasi 100%), meskipun pagu anggarannya disesuaikan (efisiensi), realisasi 100% pada sub kegiatan ini memastikan fungsi koordinasi di tingkat kecamatan berjalan tanpa hambatan birokrasi.
2. Program Stabilitas Sosial: Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat (realisasi 95-100%), penyerapan anggaran yang sangat tinggi pada pos ini (disemua kelurahan) menunjukkan bahwa Kecamatan Bekasi Barat aktif melakukan pendekatan persuasif. Ketika tokoh masyarakat merasa dilibatkan, potensi konflik menurun, dan persepsi warga terhadap kinerja pemerintah menjadi positif.



Sinergitas Forkopincam (TNI/POLRI), realisasi kegiatan ini mendukung terciptanya rasa aman.

3. Program Penunjang: Penunjang Urusan Pemerintahan kabupaten/Kota

Program ini bersifat internal, namun kegagalan di sini akan merusak layanan di depan (front-end).

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (realisasi 90,22), serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Realisasi 91,09%), pos ini membiayai tenaga operasional termasuk Satgas Pamor. Keaktifan mereka di tingkat RW dalam program Pesona dibiayai dari sini. Realisasi yang tinggi memastikan petugas selalu tersedia untuk melayani warga di lapangan.

Kegiatan lainnya dalam program ini menunjang ketersediaan sarana dan prasana dalam pemberian layanan publik yang optimal

h) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja Kecamatan Bekasi Barat yang luar biasa di tahun 2025 tidak diraih semata-mata karena besarnya anggaran, melainkan karena kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya secara cerdas, tepat guna, dan efisien. Kami menerapkan prinsip "bekerja lebih cerdas" dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal untuk memberikan dampak sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Efisiensi yang dilakukan bukan sekadar memotong biaya, tetapi memastikan setiap asset, baik itu personil, teknologi, maupun hubungan antarlembaga memberikan nilai tambah yang nyata. Berikut adalah tiga pilar utama efisiensi yang menjadi kunci sukses Kecamatan Bekasi Barat di tahun 2025:

1. Pemanfaatan Satgas Pamor dan Program Pesona, Satgas Pamor (Petugas Pemantau Monitoring dan Evaluasi) adalah ujung tombak yang sangat efisien dalam program Pesona (Pelayanan Siaga On Area). Dengan menempatkan layanan di tingkat RW, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan waktu untuk ke Kantor Kecamatan atau Kelurahan. Ini menurunkan cost of access bagi warga. Satgas Pamor juga bertindak sebagai validator data, pendamping UMKN, sekaligus kurir dokumen layanan. Satu sumber manusia menyelesaikan banyak indicator kinerja.



2. Pemanfaatan teknologi (WhatsApp dan SP4N-LAPOR), penggunaan platform digital yang sudah familiar dimasyarakat menciptakan efisiensi tanpa biaya investasi infrastruktur yang besar. Penggunaan WhatsApp menjadi kanal tercepat untuk koordinasi internal dan layanan pengaduan informal. Kecepatannya dalam merespon keluhan warga secara langsung berkontribusi pada poin “Penanganan pengaduan sarana dan masukan” dalam unsur pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Penggunaan SP4N-Lapor memastikan setiap pengaduan terdokumentasi dan memiliki target waktu penyelesaian yang jelas. Ini menciptakan transparansi yang meningkatkan kepercayaan publik.
3. Sinergitas Forkopincam, kolaborasi antara Camat, Kapolsek dan Danramil meminimalkan hambatan birokrasi lintas sektoral. Sinergi ini memastikan program fisik seperti penataan lingkungan RW Bekasi Keren berjalan tanpa gangguan keamanan. Masalah sosial yang kompleks (seperti sengketa lahan atau sampah liar) diselesaikan dalam satu meja koordinasi, menghemat waktu birokrasi yang biasanya berbelit.
4. Optimalisasi Anggaran Berbasis Skala Prioritas (Value for Money). Kecamatan Bekasi Barat menerapkan efisiensi anggaran dengan cara mengalihkan biaya-biaya operasional yang bersifat administratif (seperti pengurangan penggunaan kertas/ATK melalui digitalisasi) ke dalam kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Total anggaran sebesar Rp37.076.152.366 dikelola dengan prinsip ketepatan sasaran. Sebagai contoh, melalui integrasi program Pesona, beberapa kegiatan pelayanan dapat dilakukan dalam satu waktu dan lokasi, sehingga menghemat biaya sewa sarana prasarana dan konsumsi. Hasilnya, dengan pagu anggaran yang tersedia, Kecamatan mampu menghasilkan capaian kinerja (seperti peningkatan IKM) yang jauh melampaui target, yang berarti terjadi efisiensi biaya per unit layanan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Capaian Kinerja pada Kecamatan Bekasi Barat berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerjanya ditunjang



dari sisi pendanaan pada Tahun Anggaran 2025. Adapun perbandingan pagu anggaran Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.28 Perbandingan Pagu Anggaran Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Per Program Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi	
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	22.853.568.600	23,860,723,056	21.461.465.028	22,218,366,301
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	330.810.000	387,735,000	281.368.050	362,320,650
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	11.059.824.400	20.711.403.800	10.969.593.125	20.469.858.346
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.000.000	38,312,000	38.936.000	38,312,000
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.486.233.000	1,411,775,000	1.430.300.500	1,402,403,000
Total		35.770.436.000	46.409.948.856	34.181.662.703	44.491.260.297

Sumber Data : aplikasi siencang Tahun 2024 dan Tahun 2025

Capaian kinerja pada Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan serta pekerjaan yang dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai dengan output dan outcome yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program kerjanya, pendanaan Kecamatan Bekasi Barat pada Tahun Anggaran 2025 menggunakan



Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Khusus, dan DBH dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.29 Pagu Anggaran Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Per Program Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Pagu Anggaran			Persen (%)
		Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	25.821.847.680	23.860.723.056	22.218.366.301	93.12
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	425.000.000	387.735.000	362.320.650	93.45
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	13.065.563.650	20.711.403.800	20.469.858.346	98.82
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.000.000	38.312.000	38.312.000	100
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.476.233.000	1.411.775.000	1.402.403.000	99.34
Total		40.828.644.330	46.409.948.856	44.491.260.297	95.87

Sumber Data Realisasi Anggaran melalui aplikasi siencang Tahun 2025

Alokasi Anggaran Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi pada Tahun 2025 sebelum perubahan sebesar **Rp. 40.828.644.330** dan setelah perubahan sebesar **Rp. 46.409.948.856**, realisasi sebesar **Rp. 44.491.260.297** memperoleh capaian realisasi sebesar **95.87 persen** dipengaruhi oleh hal sebagai berikut :

1. Optimalisasi kolaborasi dengan unsur LKM

Tingginya realisasi didorong oleh aktivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dukungan 100% LKM aktif (RT/RW, LPM, BKM, Posyandu dan PKK) mempercepat eksekusi program di lapangan.

2. Efisiensi biaya operasional melalui digitalisasi

Peningkatan kepuasan masyarakat (IKM naik 1.56%) yang dicapai dengan realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% menunjukkan adanya efisiensi kinerja. Penggunaan aplikasi digital dan TTE (Tanda Tangan Elektronik) berhasil



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

memangkas biaya birokrasi lainnya, namun tetap memberikan hasil pelayanan yang prima.

3. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang efisien

Sisa anggaran sebesar kurang lebih 6.14% bukan disebabkan oleh kegagalan program, melainkan hasil dari:

- Efisiensi Pengadaan
- Manajemen Pengeluaran, seleksi ketat terhadap kegiatan pendukung yang dinilai kurang berdampak langsung pada output prioritas (pengentasan kemiskinan dan stunting), sehingga anggaran dialokasikan secara sangat hati-hati.

4. Masa Transisi Perencanaan

Kecamatan Bekasi Barat melakukan sinkronisasi anggaran secara hati-hati pada akhir tahun untuk memastikan seluruh kegiatan tetap selaras dengan transisi menuju Renstra 2025-2029. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih pendanaan antara program penanganan stunting pusat dan daerah.

Tabel 3.30 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bekasi Barat

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		KETERANGAN
				Rp	(%)	
Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Barat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		387,735,000	362,320,650	93.45%	100%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	-	0%	0%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Kelurahan Bintarajaya	-	-	0	Pindah Sub Kegiatan
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		236,075,000	231,510,650	98.07%	100%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana	Kecamatan	41,075,000	40,310,000	98.14%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		KETERANGAN
				Rp	(%)	
	dan Prasarana Pelayanan Umum					
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Bintara	20,000,000	19,345,000	96.73%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Bintarajaya	40,000,000	39,710,000	99.28%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Kranji	45,000,000	44,760,000	99.47%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Kotabaru	40,000,000	38,691,750	96.73%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Jakasampurna	50,000,000	48,693,900	97.39%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		151,660,000	130,810,000	86.25%	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan	151,660,000	130,810,000	86.25%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1,411,775,000	1,402,403,000	99.34%	100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1,411,775,000	1,402,403,000	99.34%	100%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan	50,250,000	46,200,000	91.94%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan	290,025,000	285,965,000	98.60%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Bintara	234,000,000	233,553,000	99.81%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		KETERANGAN
				Rp	(%)	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Bintarajaya	170,000,000	169,544,000	99.73%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Kranji	150,000,000	150,000,000	100.00%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Kotabaru	193,500,000	193,321,000	99.91%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Jakasampurna	324,000,000	323,820,000	99.94%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		38,312,000	38,312,000	100.00%	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		38,312,000	38,312,000	100%	100%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan	38,312,000	38,312,000	100.00%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		23,860,723,056	22,218,366,301	93.12%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8,530,000	8,530,000	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan	8,530,000	8,530,000	100.00%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17,135,649,000	15,716,174,938	91.72%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan	17,126,999,000	15,707,524,938	91.71%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan	8,650,000	8,650,000	100.00%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	0%	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan	-	-	0.00%	Dilakukan rasionalisasi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		485,540,000	466,820,549	96.14%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan	20,000,000	19,636,649	98.18%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan	240,000,000	236,617,900	98.59%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		KETERANGAN
				Rp	(%)	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan	50,000,000	49,166,000	98.33%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan	20,000,000	15,600,000	78.00%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan	105,540,000	96,080,000	91.04%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan	50,000,000	49,720,000	99.44%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5,397,365,056	5,255,715,730	97.38%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan	438,875,000	426,909,079	97.27%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan	4,958,490,056	4,828,806,651	97.38%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		54,845,000	53,708,000	97.93%	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	54,845,000	53,708,000	97.93%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		778,794,000	717,417,084	92.12%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan	98,200,000	72,894,909	74.23%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan	167,800,000	134,898,675	80.39%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	112,794,000	112,426,500	99.67%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan	400,000,000	397,197,000	99.30%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		20,711,403,800	20,469,858,346	98.83%	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		20,511,403,800	20,269,858,346	98.82%	100%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		KETERANGAN
				Rp	(%)	
Kecamatan Bekasi Bara	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan	120,000,000	114,632,500	95.53%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan	158,676,000	142,045,600	89.52%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bintara	3,740,846,800	3,736,695,396	99.89%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bintarajaya	3,105,761,000	3,102,024,800	99.88%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kranji	3,156,832,000	3,055,682,000	96.80%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kotabaru	4,463,584,400	4,361,674,400	97.72%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jakasampurna	4,765,703,600	4,757,103,650	99.82%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Pembangunan Sarana Prasana	Kelurahan Bintara	200,000,000	200,000,000	100.00%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Pembangunan Sarana Prasana	Kelurahan Bintarajaya	200,000,000	200,000,000	100.00%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Pembangunan Sarana Prasana	Kelurahan Kranji	200,000,000	200,000,000	100.00%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Pembangunan Sarana Prasana	Kelurahan Kotabaru	200,000,000	200,000,000	100.00%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Pembangunan Sarana Prasana	Kelurahan Jakasampurna	200,000,000	200,000,000	100.00%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan	0	0	0.00%	Dilakukan Rasionalisasi
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		200,000,000	200,000,000	100.00%	100%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bintara	40,000,000	40,000,000	100.00%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bintarajaya	40,000,000	40,000,000	100.00%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kranji	40,000,000	40,000,000	100.00%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		KETERANGAN
				Rp	(%)	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kotabaru	40,000,000	40,000,000	100.00%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Jakasampurna	40,000,000	40,000,000	100.00%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan

Sumber Data: Siencang e-monev Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025, TW I dan TW IV

Analisa program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.31 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT	TARGET (Rp)	REALISASI ANGGARAN		KENDALA
			Rp	(%)	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		387,735,000	362,320,650	93.45%	100%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	-	0%	0%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Kelurahan Bintarajaya	-	-	0	Pindah Sub Kegiatan Dikarenakan salah kegiatan
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		236,075,000	231,510,650	98.07%	100%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan	41,075,000	40,310,000	98.14%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Bintara	20,000,000	19,345,000	96.73%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT	TARGET (Rp)	REALISASI ANGGARAN		KENDALA
			Rp	(%)	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Bintarajaya	40,000,000	39,710,000	99.28%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Kranji	45,000,000	44,760,000	99.47%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Kotabaru	40,000,000	38,691,750	96.73%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Jakasampurna	50,000,000	48,693,900	97.39%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		151,660,000	130,810,000	86.25%	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan	151,660,000	130,810,000	86.25%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1,411,775,000	1,402,403,000	99.34%	100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1,411,775,000	1,402,403,000	99.34%	100%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan	50,250,000	46,200,000	91.94%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT	TARGET (Rp)	REALISASI ANGGARAN		KENDALA
			Rp	(%)	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan	290,025,000	285,965,000	98.60%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Bintara	234,000,000	233,553,000	99.81%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Bintarajaya	170,000,000	169,544,000	99.73%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Kranji	150,000,000	150,000,000	100.00%	Kegiatan realisasi keuangan terserap 100 %
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Kotabaru	193,500,000	193,321,000	99.91%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Jakasampurna	324,000,000	323,820,000	99.94%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		38,312,000	38,312,000	100.00%	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		38,312,000	38,312,000	100%	100%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan	38,312,000	38,312,000	100.00%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT	TARGET (Rp)	REALISASI ANGGARAN		KENDALA
			Rp	(%)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		23,860,723,056	22,218,366,301	93.12%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8,530,000	8,530,000	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan	8,530,000	8,530,000	100.00%	Kegiatan realisasi keuangan terserap 100 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17,135,649,000	15,716,174,938	91.72%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan	17,126,999,000	15,707,524,938	91.71%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan	8,650,000	8,650,000	100.00%	Kegiatan realisasi keuangan terserap 100 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	0%	100%
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan	-	-	0.00%	Dilakukan rasionalisasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah		485,540,000	466,820,549	96.14%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan	20,000,000	19,636,649	98.18%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan	240,000,000	236,617,900	98.59%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan	50,000,000	49,166,000	98.33%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan	20,000,000	15,600,000	78.00%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT	TARGET (Rp)	REALISASI ANGGARAN		KENDALA
			Rp	(%)	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan	105,540,000	96,080,000	91.04%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan	50,000,000	49,720,000	99.44%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5,397,365,056	5,255,715,730	97.38%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan	438,875,000	426,909,079	97.27%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan	4,958,490,056	4,828,806,651	97.38%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		54,845,000	53,708,000	97.93%	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	54,845,000	53,708,000	97.93%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		778,794,000	717,417,084	92.12%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan	98,200,000	72,894,909	74.23%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT	TARGET (Rp)	REALISASI ANGGARAN		KENDALA
			Rp	(%)	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan	167,800,000	134,898,675	80.39%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	112,794,000	112,426,500	99.67%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan	400,000,000	397,197,000	99.30%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		20,711,403,800	20,469,858,346	98.83%	100%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		20,511,403,800	20,269,858,346	98.82%	100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan	120,000,000	114,632,500	95.53%	Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan	158,676,000	142,045,600	89.52%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bintara	3,740,846,800	3,736,695,396	99.89%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bintarajaya	3,105,761,000	3,102,024,800	99.88%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT	TARGET (Rp)	REALISASI ANGGARAN		KENDALA
			Rp	(%)	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kranji	3,156,832,000	3,055,682,000	96.80%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kotabaru	4,463,584,400	4,361,674,400	97.72%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jakasampurna	4,765,703,600	4,757,103,650	99.82%	kegiatan realisasi keuangan terserap sebagai berikut dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan Sisa Penawaran
Pembangunan Sarana Prasana	Kelurahan Bintara	200,000,000	200,000,000	100.00%	Kegiatan realisasi keuangan terserap 100 %
Pembangunan Sarana Prasana	Kelurahan Bintarajaya	200,000,000	200,000,000	100.00%	Kegiatan realisasi keuangan terserap 100 %
Pembangunan Sarana Prasana	Kelurahan Kranji	200,000,000	200,000,000	100.00%	Kegiatan realisasi keuangan terserap 100 %
Pembangunan Sarana Prasana	Kelurahan Kotabaru	200,000,000	200,000,000	100.00%	Kegiatan realisasi keuangan terserap 100 %
Pembangunan Sarana Prasana	Kelurahan Jakasampurna	200,000,000	200,000,000	100.00%	Kegiatan realisasi keuangan terserap 100 %
Evaluasi Kelurahan	Kecamatan	0	0	0.00%	Dilakukan Rasionalisasi
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		200,000,000	200,000,000	100.00%	100%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bintara	40,000,000	40,000,000	100.00%	Kegiatan realisasi keuangan terserap 100 %
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bintarajaya	40,000,000	40,000,000	100.00%	Kegiatan realisasi keuangan terserap 100 %
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kranji	40,000,000	40,000,000	100.00%	Kegiatan realisasi keuangan terserap 100 %



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT	TARGET (Rp)	REALISASI ANGGARAN		KENDALA
			Rp	(%)	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kotabaru	40,000,000	40,000,000	100.00%	Kegiatan realisasi keuangan terserap 100 %
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Jakasampurna	40,000,000	40,000,000	100.00%	Kegiatan realisasi keuangan terserap 100 %

Sumber Data: Siencang e-monev Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025, TW I dan TW IV

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Kecamatan Bekasi Barat mencapai 95,87%. meskipun angka ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, terdapat beberapa kendala teknis dan administratif pada sub-kegiatan tertentu yang menyebabkan penyerapan tidak mencapai 100%

1. Kendala Administratif dan Dokumentasi

Hambatan paling signifikan muncul dari sisi penatausahaan dokumen keuangan yang menjadi syarat pencairan anggaran. Kurangnya dokumen pendukung dan kelengkapan SPJ tidak terpenuhi secara utuh, hal ini menunjukkan perlunya peningkatan ketertiban personil dalam pengarsipan bukti transaksi.

2. Kendala Operasional dan Teknis Lapangan

Terdapat penyesuaian aktivitas di lapangan yang berdampak pada rendahnya penyerapan beberapa pos belanja :

- Kebutuhan Riil di Bawah Estimasi: Pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, terdapat sisa anggaran karena menyesuaikan dengan kebutuhan Bahan Bacaan yang diperlukan.
- Kebutuhan Riil di Bawah Estimasi: Pada sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi mencapai 74.23%, dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan kendaraan Dinas Operasional Jabatan.

3. Kendala Perencanaan dan penyerapan Belanja Penunjang

Beberapa belanja penunjang operasional tidak terserap secara optimal karena faktor efisiensi dan perubahan kebutuhan:

- Belanja foto copy dan spanduk : pada sub kegiatan penyediaan bahan bacaan, terdapat rendahnya penyerapan karena belanja foto copy dan spanduk tidak



terserap sepenuhnya. Hal ini mengindikasikan transisi ke arah digitalisasi dokumen yang mulai mengurangi kebutuhan cetak fisik.

- b. Belanja BBM dan SPPD: Pada rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, terdapat sisa pagu pada komponen BBM dan SPPD yang tidak diserap, yang mencerminkan optimalisasi koordinasi jarak jauh atau efisiensi perjalanan dinas.

4. Keberhasilan kinerja berbasis masyarakat

Berbeda dengan urusan penunjang, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menunjukkan kinerja yang sangat presisi:

- a. Pemberdayaan Masyarakat dan LKM: Program pemberdayaan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan (LPM/PKK) mencatatkan realisasi rata-rata 98,83%.
- b. Honorarium Masyarakat: Pembayaran honorarium bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kader kemasyarakatan berjalan lancar dan sesuai dengan alokasi anggaran kas, menunjukkan tata kelola administrasi kemasyarakatan yang sudah mapan.

Untuk meminimalisir hambatan tersebut pada tahun anggaran mendatang, Kecamatan Bekasi Barat perlu melakukan:

1. Digitalisasi Pengarsipan SPJ: untuk mengurangi kehilangan bukti fisik pendukung SPJ
2. Review Perencanaan: Melakukan review terhadap pagu belanja fotocopy dan spanduk agar dialihkan ke pos digitalisasi atau kegiatan pemberdayaan yang lebih mendesak sesuai target RPJMD 2025-2029.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2025 merupakan potret akuntabilitas dalam masa transisi perencanaan pembangunan. Secara umum, Kecamatan Bekasi Barat telah berhasil menjaga kesinambungan kinerja antara target yang ditetapkan dalam Renstra 2024-2026 (Periode RPD) dengan akselerasi indikator baru dalam Renstra 2025-2029 (Periode RPJMD).

Keberhasilan ini tercermin dalam capaian indikator kinerja utama sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Transisi (Renstra 2024-2026)

Kecamatan Bekasi Barat berhasil mempertahankan tren positif pada indikator makro pelayanan dan akuntabilitas:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) : Meraih nilai 62,81 (Target 72).
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik: Mencapai nilai 82,3 (Target 85,56). Angka ini menunjukkan bahwa standar pelayanan publik di Kecamatan Bekasi Barat telah melampaui ekspektasi masyarakat.
3. Persentase peningkatan wilayah tertib: Tercapai 100% (Target 71%), yang mencerminkan stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah tetap terjaga sesuai rencana.

B. Capaian Kinerja Strategis Baru (Renstra 2025-2029)

Sebagai langkah awal transformasi tata kelola, indikator baru yang berfokus pada partisipasi masyarakat menunjukkan hasil yang luar biasa:

1. Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik: Mencapai 100% (Target 70%). Keaktifan penuh dari RT/RW, LPM, BKM, PKK, dan Posyandu menjadi kunci akurasi data dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.



2. Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di kecamatan: Tidak Tercapai -3,2% (Target 0,64%)

4.2 Rencana Tindak

Guna mempertahankan capaian kinerja dan memperbaiki kendala administratif yang ditemukan pada tahun 2025, Kecamatan Bekasi Barat menetapkan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penguatan Akuntabilitas: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelarasan program dengan target RPJMD 2025-2029, serta meningkatkan kualitas dokumentasi pelaporan kinerja di tingkat Kelurahan agar lebih sinkron dengan Kecamatan.
2. Digitalisasi Pendataan Partisipatif LKM: Mengembangkan sistem pelaporan digital bagi LKM (RT/RW dan PKK) agar suplai data by name by address terkait stunting dan ekonomi dapat diperbarui secara real-time, sehingga kebijakan intervensi Wali Kota Bekasi dapat dieksekusi lebih cepat.
3. Peningkatan Kepuasan Masyarakat Berkelanjutan: Memperluas jangkauan layanan mobile dan optimalisasi aplikasi digital untuk mempertahankan tren kenaikan IKM, serta melakukan survei per unsur secara periodik untuk mendeteksi dini penurunan kualitas layanan pada titik tertentu.
4. Perbaikan Tata Kelola Administrasi Keuangan:
5. Meningkatkan ketertiban personil dalam pengarsipan bukti belanja untuk meminimalisir sisa pagu akibat kendala SPJ.
6. Mitigasi Operasional Wilayah: Menyusun jadwal kegiatan operasional (seperti K3 dan Harkamtibmas) yang lebih fleksibel namun tetap efektif pada bulan-bulan khusus (seperti Ramadhan), agar penyerapan anggaran tetap optimal tanpa mengurangi esensi kegiatan. Kecamatan Bekasi Barat berkomitmen untuk menjadikan LKIP ini bukan sekadar kewajiban laporan tahunan, melainkan instrumen perbaikan diri untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Barat.



| Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2025

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.

Bekasi Barat, 10 Januari 2026
Pt. CAMAT BEKASI BARAT



DEWI ASTIYANTI, S.T., M.Si.

Pembina

NIP. 19770831 200012 2 001